PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PPKn SEBAGAI PENGUAT INTEGRASI NASIONAL

Kusmaknawiyah
Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban
Email: kusmakna@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine, find the basic ideas of the theoretical conceptual framework and the implementation of anti-corruption education through Civic Education learning as a reinforcement of the nation's character. This study uses a qualitative approach, data collection techniques with documentation, interviews, and observations. The results of this study indicate that the construction of Pancasila and Citizenship Education teachers on corruption and anti-corruption contributes greatly to the construction of students, in addition to the influence of mass and electronic media. The supporting factors for fostering student character through anti-corruption education are divided into two groups, namely internal and external. The development of syllabus, indicators, objectives, scenarios, learning resources, media, models, methods, learning strategies, and evaluation tools need to be improved because there are still many shortcomings to be able to strengthen the nation's character.

Keywords: *Anti Corruption Education, PPKn, National Character*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual teoritis dan implementatif pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penguat karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik. Faktor

pendukung pembinaan karakter siswa melalui pendidikan antikorupsi dibagi menjadi dua golongan, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan silabus, indikator, tujuan, skenario, sumber belajar, media, model, metode, stategi pembelajaran, dan alat evaluasi perlu diperbaiki karena masih banyak kekurang- an untuk dapat memperkuat karakter bangsa.

Kata kunci: *Pendidikan Anti Korupsi, PPKn, Karakter Bangsa*

PENDAHULUAN

Madrasah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, Madrasah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi (PAK) dapat dimasukan dalam kurikulum madrasah, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. PAK dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku siswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim Madrasahsangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan PAK adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Madrasah Perguruan Tinggi (PT). Dalam PPKn akan ditanamkan nilai-nilai dan kompetensi baik menyangkut *civic knowledge, civic skills,* dan *civic disposi- tions/virtue* (*Center for Civic Education,* 1999). Bahkan Zuriah[95] menyatakan bahwa PPKn menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendi- dikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa. Urgensi pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan watak/perilaku antikorupsi sebagai pilar dalam pendidikan karakter bangsa karena upaya dila- kukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, mulai dari pembuatan berbagai peraturan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penegakan hukum belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. PAK di Madrasah mengajak siswa secara sadar membangun mental bahwa korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri, masyarakat serta masa depan bangsa.[96] PAK di Madrasah tidak diarahkan pada upaya untuk melakukan gerakan praktis pemberantasan korupsi sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi lebih menitik beratkan pada penanaman pengetahuan dasar tentang korupsi dan antikorupsi, sikap, dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ketaatan terhadap peraturan madrasah , adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain.

Pandangan yang lebih eksplisit dalam kesimpulan penelitian disampaikan oleh *Center*

[95] Zuriah, *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal,* (Bandung: Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang, 2011), hlm.1.
[96] Darmawan, *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi,* (Bandung: Pustaka Aulia Press, 2010), hlm. 3.
3 Center For Indonesian Civic Education Education, *A Needs-Assesment for New Indonesian Civic Education,* (Bandung: CICED, 2000), hlm. 43.

for Indonesian Civic Education[97] bahwa *content for the new civic education should include key con- cepts such as democracy, good governance, anti corruption, the constitutional, national identity, and civic value.* Hasil kesimpulan ini memberikan penguatan urgensi wawasan antikorupsi sebagai sa- lah satu paradigma baru isi PPKn. Rekomendasi *Center for Indonesian Civic Education* menjadi salah satu dasar dalam tujuan PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu "berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan ber- negara, serta antikorupsi" (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Isi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menunjukkan betapa pentingnya PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai wahana menanamkan sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu inheren dengan perikehidupan siswa saat ini dan yang akan datang.

Adanya PAK dalam pembelajaran PPKn diharap- kan mampu memberikan bekal awal tentang pengetahuan, pemahaman, dan akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu terkonstruk dalam diri siswa.. Akibatnya, individu akan memperlihatkan perilaku me- nyimpang untuk memuaskan diri sendiri. Anomie me- rupakan bentuk perilaku menyimpang karena adanya benturan dalam struktur sosial atau untuk mencapai tujuan tertentu melalui bentuk-bentuk yang menyimpang.[98] Hal ini mengisyaratkan bahwa korupsi dengan berbagai macam modus dan tujuannya merupakan bentuk anomie yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan.

Salah satu upaya mencegah korupsi dan mengembangkan sikap antikorupsi melalui Sekolah /Madrasah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Upaya tersebut diawali dengan menyusun buku panduan PAK yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN). Sebagai *pilot project* ditetapkan tiga mata pelajaran yang mengintegrasikan PAK yakni PPKn, Agama, dan Bahasa Indonesia, serta budaya Madrasahyang disisipi dengan PAK mulai Sekolah/Madrasah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah/Madrasah/SMA (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2009). Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa Madrasah adalah proses pembudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Oleh karena itu, jika Madrasah dapat memberikan semangat dan atmosfer yang sengaja diciptakan untuk mendukung internalisasi nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi.

[98] Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives,* (Jakarta: PT.Gramedia., 1989) hlm. 154.
5. Patton, *How to Qualitative Methods in Evaluation,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 13.

METODE

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan evaluasi kualitatif ditempuh dengan pertimbangan sebagai upaya pengembangan program terutama dari sisi proses perencanaan dan penerapan serta "menjaga agar tetap *naturalistik* yang berguna untuk mengkaji implementasi program".[99] Dengan penelitian evaluatif dapat diketahui, dievaluasi, dan dinilai berdasarkan dampak serta hasil aktualnya, bukan sematamata tujuan yang diinginkan sebelumnya.[100] Apa yang terjadi dalam program sering kali bervariasi seperti halnya perubahan kondisi, perbedaan lokasi, pelaksa- na di lapangan, atau hal lain yang tidak dapat diramal- kan atau diantisipasi sepenuhnya.

Dalam penelitian evaluatif ini peneliti menggunakan metode interpretivis karena selalu berhubungan dengan kontekstualisasi makna dan realitas sosial selalu dikonstruksi secara sosial pula.[101] Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan setelah mendapatkan data dokumentasi yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan, pengalaman guru PPKn, dan siswa tentang pelaksanaan PAK melalui pembelajaran PPKn. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dokumen internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) visi, misi, program kerja, dan kebijakan Sekolah/Madrasah serta (2) silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn yang disusun guru. Dokumen formal yang dimanfaatkan meliputi:

1) Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar Isi khususnya pada mata pelajaran PPKn jenjang SMA/MTs
2) Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan khususnya pada mata pelajaran PPKn jenjang MA/MTs
3) dokumentasi lain yang dipandang perlu sebagai implementasi PAK di madrasah. Agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam penelitian ini upaya yang akan dilakukan adalah memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan baik pada saat wawancara maupun observasi, melakukan triangula- si baik metode maupun sumber data, melibatkan teman sejawat yang tidak ikut penelitian, dan melaku- kan analisis negatif.

Kriteria yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah *setting, actors, process*.[102] Latar (*setting*) berkaitan dengan situasi dan tempat berlangsungnya pengambilan data, yakni di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. Pelaku (*actors*)

6. Scriven dalam Denzin & Lincoln, *Hand book of Qualitative Research,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm.702.
7. Scriven dalam Denzin & Lincoln, *Hand book……*.hlm. 704.
8. Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods,* (Newbury Park, CA: Sage, 1993), hlm. 56.

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru PPKn, kepala madrasah, penanggung jawab kantin kejujuran, dan siswa MA. Sedangkan kriteria proses (*process*) adalah wawancara dan observasi antara peneliti dengan subjek/aktor berkaitan dengan fokusmasalah penelitian ini. Lokasi penelitian di MAN 1 Tuban Pemilihan lokasi dipilih atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut ada kantin kejujuran dan kesediaan dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Informan da- lam penelitian ini adalah kepala madrasah, guru PPKn, penanggung jawab kantin kejujuran dan siswa.

Tahap-tahap analisis data secara umum dilakukan dengan cara membuat manajemen data secara pragmatis yakni langkah-langkah yang diperlukan untuk mengolah kumpulan data secara sistematik dan koheren.[103] Jika data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah terkumpul akan dilakukan reduksi data, artinya data yang demikian banyak disederhanakan berdasarkan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, instrumen penelitian yang digunakan. Data yang telah terkumpul dirangkum, diberi kode, dirumuskan berdasarkan tema, dikelompokkan, dan disajikan se- cara tertulis. Setelah itu, dilakukan penyajian data sebagai informasi padat terstruktur yang memungkin- kan untuk diinterpretasi dan disimpulkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian evaluasi adalah analisis isi, domain, dan *Focus Group Disscusion* (FGD). Ketiga analisis data di atas dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah analisis induktif sebagaimana yang disampaikan oleh Patton.[104] bahwa *inductive analysis means that the patterns, themes, and categories of analysis come from the data, they emerge out of the data rather than being imposed on them prior to data collection and analysis.* Ini berarti bahwa dalam analisis induk- tif mencakup pola-pola, tema, dan katagori-kategori yang berasal dari data yang telah dikumpulkan agar bermakna baik.

HASIL

Dalam pandangan kepala madrasah, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami benar-benar miris (merinding) melihat ko- rupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat yang nilainya tidak tangung-tanggung, luar biasa besarnya dan terjadi di semua kementerian, tanpa terkecuali. Termasuk di lingkungan kementerian agama yang notabene merupakan lembaga yang identik dengan urusan iman, taqwa, dosa, pahala, surga, dan neraka. Pejabat tinggi banyak yang melakukan korupsi maka secara otomatis akan di- tiru pejabat yang di bawahnya. (Sumber: hasil wawancara dengan kepala madrasah: diolah).

[103]Huberman, A. M., Miles, *Handbook of Qualitative Research,* (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 591.
[104] Patton, *How to Qualitative Methods in Evalation,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 390.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampai- kan guru PPKn, bahkan lebih detail dalam menyikapi.

Kami sangat heran dengan fenomena korupsi di Indonesia, semakin hari bukannya berkurang tetapi semakin bertambah, baik di tingkat pusat mau- pun daerah. Hukuman yang dijatuhkan ternyata tidak memberi efek jera pelaku korupsi. Pemerintah segera meninjau ulang hukuman bagi koruptor. Misalnya, orang yang telah terbukti sah dan meya- kinkan melakukan korupsi dengan kerugian di atas 10 milyar rupiah perlu dihukum mati atau di- miskinkan atau perlu diberi cap (label) sebagai teroris berdasi. Pemberian hukuman mati dan la- bel sebagai teroris, setidaknya kalau mau korupsi akan berpikir ulang, karena akibat perbuatan itu bukan saja bagi dirinya tetapi juga keluarga. Bayangkan bagaimana keluarga kita kalau diberi label sebagai teroris berdasi. Pemiskinan penting, supaya setelah keluar dari penjara masih merasa- kan akibat dari korupsi. Kami melihat banyak ko- ruptor masih hidup bergelimang harta setelah kelu- ar dari penjara. Ia masih dapat hidup dengan layak meskipun telah dipecat. Bahkan juga hidup dengan terhormat. Ini kan menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan sama sekali tidak memberikan efek jera. (Sumber: hasil wawancara dengan guru PPKn: diolah).

Masyarakat juga memberikan andil yang cukup besar dalam menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Indikator yang nampak misalnya, (1) memberi uang kepada oknum polisi karena melanggar peraturan lalulintas, ia tidak mau mengikuti prosedur resmi dengan cara menghadiri sidang di pengadilan, (2) banyak orang yang mengambil jalur pintas agar lebih cepat pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui oknum petugas, dan lain-lain.

Kepala Sekolah/Madrasah dan guru PPKn sepakat bahwa upaya penegakkan hukum yang menekankan aspek sanksi saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan upaya lain melalui PAK. PAK dapat dimasukkan dalam kurikulum Madrasahyang tertintegrasi maupun berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan PAK di Madrasahadalah PPKn. Seperti halnya *pilot project* PAK jenjang MA di Jawa Timur yang sudah berjalan sejak tahun 2009 terintegrasi pada mata pelajaran PPKn kelas XI, dalam bentuk kantin kejujuran, dan budaya madrasah. Pada mata pelajaran PPKn kelas XI semester gasal secara eksplisit ada Kompetensi Dasar (KD) yang berkaitan dengan korupsi dan antikorupsi.

Pengembangan rumusan tujuan PAK dalam RPP pada pelajaran PPKn, kelas XI semester gasal jenjang MA, dapat dilihat pada Tabel 1. Sumber belajar siswa dalam PAK melalui pembelajaran PPKn yakni Buku Madrasah Elektronik (BSE), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan koran, yang digunakan di seluruh lokasi penelitian ini. MAN 1 TUBAN menggunakan sumber tambahan berupa peraturan perundang-undangan. MAN 1 TUBAN menambahkan internet sebagai sumber belajar, dengan meminta siswa secara mandiri melakukan *browsing* dan mengunduh sebagai salah satu tugas. MAN 1 TUBAN

menggunakan sumber belajar media elektronik, namun tidak disebutkan secara terperinci dalam RPP.

Model dan metode PAK dalam pembelajaran PPKn cukup bervariasi seperti pada Tabel 2, sementara aktivitas di dalam kelas dapat dilihat pada Tabel 3. PAK dalam pembelajaran PPKn juga dilakukan ases- men untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. Tek nik asesmen yang dikembangkan guru PPKndapat dilihat pada Tabel 4.

Pembelajaran PPKn pada topik korupsi dan antikorupsi di kelas XI semester gasal, mampu memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi siswa MA.

Tabel 1. Tujuan PAK dalam Pembelajaran PPKn Kelas XI MAN 1 Tuban yang Dikembangkan Guru pada KD 3.4 dan 3.5

KELAS	KOGNITIF						JUMLAH
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
XI MIPA 1	4	3	-	1	-	-	**8**
XI MIPA 2	3	5	1	2	-	-	**11**
XI IPS 1	4	-	-	-	-	-	**4**
XI IPS 2	3	5	1	2	-	-	**11**
XI AGAMA	1	2	2	-	-	-	**5**
XI BAHASA	2	2	1	1	-	-	**6**
JUMLAH	17	17	5	6	0	0	**45**

Keterangan:
Sumber: data dokumentasi: diolah C1, C2, dst.: tingkatan kognitif

Tabel 2. Model dan Metode dalam PAK melalui Pembelajaran PPKn Kelas XI MAN 1 Tuban

Model dan Metode yang digunakan

KELAS	Model dan Metode yang Digunakan dalam KBM				
	Ceramah	Tanya Jawab	Diskusi Kelas	Penugasan	Kooperatif
XI MIPA 1	V	V	V	-	V
XI MIPA 2	V	V	V	V	V
XI IPS 1	V	V	-	V	-
XI IPS 2	V	V	V	V	-
XI AGAMA	V	V	V	V	-
XI BAHASA	V	V	V	-	-

Tabel 3. Aktivitas PAK dalam Pembelajaran PPKn Kelas XI MAN 1 Tuban

KELAS	Aktivitas Siswa dalam PAK			
	Dengarkan Penjelasan Guru	Tanya Jawab	Kerjakan LKS	Diskusi Kelas
XI MIPA 1	V	V	V	-
XI MIPA 2	V	V	-	V
XI IPS 1	V	V	V	V
XI IPS 2	V	V	-	V
XI AGAMA	V	V	-	V
XI BAHASA	V	V	V	V

Tabel 4.Teknik Asesmen PAK dalam Pembelajaran PPKn Kelas XI MAN 1 Tuban

KELAS	Teknik Asesmen				
	Subjektif	Objektif	Lisan	Projek	Unjuk Kerja
XI MIPA 1	V	V			
XI MIPA 2	V	-	-	V	V
XI IPS 1	V	-	-	V	-
XI IPS 2	V	-	-	V	V
XI AGAMA	V	-	-	,	V
XI BAHASA	V	-	-	-	-

Hal ini terlihat saat wawancara, mereka dengan lancar dan percaya diri memberikan penjelasan secara lisan tentang pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, dan sikap yang jelas berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Siswa memaknai korupsi lebih banyak pada aspek legal formal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Bagi siswa MAN 1 Tuban XI MIPA 1, XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI Bahasa pengertian korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh informasi yang disajikan oleh guru maupun dari buku paket PPKn kelas XI. Sedangkan bagi siswa Kelas XI MIPA 2 dan XI Agama, memberikan definisi bahwa tindakan menyontek juga merupakan korupsi. Hal ini karena di Kelas XI MIPA 2 menyontek dipahami sebagai tindakan korupsi dan mendapatkan sanksi yang sangat tegas yakni kertas ujian disobek lima menit sebelum ulangan berakhir setelah mendapatkan peringkatan terlebih dahulu. Pemahaman siswa di MAN 1 Tuban XI MIPA 1, XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI Bahasa tentang contoh korupsi di Indonesia sebagian besar diperoleh melalui pembelajaran PPKn dan media cetak dan elektronik serta internet. Ketika ada kasus-kasus korupsi besar yang diberitakan secara terus menerus melalui televisi mempunyai pengaruh setidaknya pada pengetahuan siswa, misalnya kasus Gayus Tambunan. Siswa justru lebih paham kasus Gayus Tambunan dibandingkan kasus-

kasus korupsi di daerah (lokal) yang tidak diberitakan melalui televisi. Dalam pandangan siswa, ada dua faktor orang melakukan korupsi, pertama, dorongan pribadi. Dorongan pribadi muncul karena kurangnya pengamalan agama secara benar (kurangnya rasa keimanan), keinginan kaya dengan cara yang mudah dan cepat.

Kedua, berasal dari pengaruh lingkungan kerja, sistem, dan kesempatan. Bagi siswa, antikorupsi dimaknai sebagai: (1) sikap mencegah korupsi yang dimulai hal-hal sederhana, dari diri sendiri seperti disiplin, (2) bertindak jujur apa yang menjadi hak dan yang bukan menjadi hak kita, (3) berani melaporkan apabila ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh siswa. Misalnya, tidak membayar di kantin, menyontek, berbohong dan lain-lain, (4) cara mencegah agar tidak melakukan korupsi, apapun bentuknya, (5) sikap menentang segala bentuk korupsi, mulai dari yang sederhana seperti jujur, malu jika terlambat atau berbohong sampai dengan melaporkan ke pihak yang berwajib jika diperlukan bila ada korupsi di madrasah yang dilakukan oleh guru atau kepala madrasah.

Sikap siswa melihat kondisi korupsi di Indonesia sudah melampaui batas kewajaran. Siswa memberikan indikator ketidakwajaran kondisi korupsi di Indonesia seperti: (1) jumlah yang dikorupsi sudah sangat banyak sehingga akan dapat merugikan keuangan negara, (2) dilakukan oleh para pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh pada rakyat, (3) setiap kantor/kementerian selalu ada kasus korupsi. Ketika ditanyakan tentang wacana memiskinkan koruptor mereka masih mengalami kebingungan, karena merasa tidak pernah mendapatkan informasi tentang hukuman dengan cara membuat miskin bagi koruptor. Akan tetapi mereka menyatakan ketidaksetujuannya bila koruptor dihukum mati. Mereka berargumen bahwa hukuman mati bagi koruptor merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada tahun 2009. Kejati Jawa Timur memberikan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membuat atau membuka kantin kejujuran di madrasah. Selama kurun waktu tahun 2019-2021, model pengelolaan kantin kejujuran dibagi menjadi dua macam, yakni semi terbuka dan terbuka penuh. Kantin model semi terbuka dengan variasi (1) siswa mengambil barang kemudian membayar dengan uang pas sesuai dengan harga barang dan tidak bisa mengambil uang kembalian, seperti di MAN 1 XI MIPA 1, (2) siswa menyerahkan uang dulu kepada petugas jaga, jika uang untuk membeli memerlukan uang kembali, tetapi jika menggunakan uang yang sesuai dengan harga barang, pembeli tinggal memasukan uang pada tempat yang telah disediakan (dibuat seperti kotak amal di masjid), seperti di MAN 1 XI MIPA 2, (3) Siswa memasukan uang ke tempat yang telah disediakan, kemudian meminta kepada petugas untuk mengambilkan barang, seperti di MAN 1 XI Bahasa, kantin kejujuran tidak menjual makanan ringan karena menjadi madrasah sehat nasional. Jadi yang dijual makanan yang tidak menggunakan pembungkus plastik, seperti bakso, siomai, soto ayam, nasi pecel sehingga memang penjual yang harus mengambilkan. Tetapi jika yang dibeli pisang goreng, ketela goreng, dan sejenisnya maka

dapat mengambil sendiri. Terbuka penuh, yakni pembeli secara bebas dapat mengambil barang, menyerahkan uang, dan mengambil uang kembalian secara mandiri (self service). Kantin tidak ada yang menjaga dan hanya dicek petugas pada pagi dan siang hari, seperti di MAN 1 XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI AGAMA. Berdasarkan atas laporan keuangan selama kurun waktu 2019-2021 kantin yang masih bertahan dan mendapatkan keuntungan di MAN 1 XI MIPA 1, di MAN 1 XI MIPA 2, MAN 1 XI IPS 1, XI Agama , dan XI Bahasa. Sedangkan di MAN 1 XI IPS 1 selama periode 2019-2020 mengalami kerugian dan pada tahun 2021 grafik keuntungan mulai terlihat. Di X IPS 2 di samping mengalami kerugian juga tidak ada lagi aktivitasnya. Budaya lain yang dikembangkan di semua madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini yang mendukung PAK adalah pengadaan kas kelas dan disiplin. Sedangkan di MAN 1 XI MIPA 2 dikembangkan budaya anti menyontek. Dalam pelaksanaan budaya anti menyontek didukung penuh semua guru dan tidak ada toleransi terhadap perilaku kecurangan pada saat ujian

PEMBAHASAN

Kepala madrasah dan guru PPKn sepakat bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan bukan saja jumlah kerugian yang besar tetapi telah mengurat akar atau membudaya dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping memberikan hukuman yang setimpal, dalam pandangan guru PPKn para koruptor layak untuk dimiskinkan sebagai bentuk keadilan yang berperikehidupan karena dampak yang ditimbulkan demikian besar maka secara otomatis pemberian efek jera pun juga menyentuh perikehidupan koruptor.

Dimensi konseptual teoritis ditunjukkan pada urgensi memberikan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor. Memang tidak ada dalam peraturan yang memberikan sanksi dengan cara memiskinkan bagi koruptor. Dalam konteks ini, guru PPKn memak- nai hukum bukan saja sebagai kaidah positif, legal formal, legalistik-positivistik dengan "teleskop perundang-undangan," namun meletakkan pada konteks sosial yang lebih besar. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai suatu institusi yang esoterik dan otonom namun sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar.[105] Jika korupsi hanya dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang melanggar kaidah legal formal, hukuman fisik dan denda merupakan balasan yang wajar.

Masyarakat ternyata juga memberikan andil dalam menyuburkan praktik korupsi, seperti: (1) memberi uang pada oknum polisi karena melanggar peraturan lalulintas, (2) mengambil jalur pintas agar lebih cepat pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui oknum petugas, dan lain-lain. Pemaknaan korupsi dalam perspektif teori hukum dan sosiologi oleh guru PPKn diperkuat dengan

[105] Rahardjo, *Jurnal Ilmu Hukum,* 1999…….hlm. 4.

pentingnya PAK di madrasah karena merupakan fungsi pendidikan dalam rangka mengkonstruksi perilaku dan sebagai gerakan budaya. Budaya memberikan kerangka berpikir bagi manusia. Sesuatu dipandang salah atau benar bergantung pada sudut pandang yang dipergunakan.

Pentingnya PAK di madrasah sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Heyneman[106] bahwa ...*public good nature of education and edu- cation's role in affecting social cohesion because education serves as a way of modeling good be- havior for children or young adults, allowing an education system to become corrupt may be more costly than allowing corruption in the customs service or the policy*. Sementara dalam pandangan Gugur dan Shah (2002) untuk mereduksi korupsi da- lam suatu negara diperlukan adanya partisipasi war- ganegara dalam berbagai bentuk seperti mendirikan LSM, melakukan advokasi, berpendapat melalui me- dia, melalui madrasah sehingga menumbuhkan kepeka- an jika terjadi korupsi. Pandangan yang berbeda disampaikan Quah (2002) untuk pemberantasan korupsi perlu tiga model: (1) anti-corruption legislation with no independent agency, (2) anti-corruption legislation with several agencies, (3) anti-corruption legislation with an independent agency. Model yang dikembangkan Quah (2002) menekankan pada aspek penegakkan hukum melalui pembentukan undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi yang independen. Hasil penelitian yang dilakukan Jain (2001) bahwa sikap antikorupsi harus dibangun dari proses: (1) interaksi pemimpin pilihan rakyat dengan birokrat, (2) interaksi antara birokrat dengan anggota legislatif, (3) interaksi antara birokrat dengan rakyat. Dalam pola interaksi di atas terjadi peluang bureau- cratic corruption atau korupsi birokrasi. Warganegara harus diberi pemahaman bahwa interaksi-inter- aksi itulah yang menjadi pangkal terjadinya korupsi. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Svensson (2005); Tella dan Ades (2007) dalam memerangi korupsi harus menggunakan pendekatan penegakkan hukum yakni dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang sangat rinci dan jelas yang dilengkapi dengan penegakan secara ketat. Penelitian Svensson (2005); Tella dan Ades (2007) sama-sama memberikan contoh riil yang berhasil menggu- nakan pendekatan ini, yakni Hong Kong dan Singa- pura. Secara kebetulan kedua negara tersebut memi- liki kesamaan dengan wilayah dan jumlah penduduk yang kecil serta sektor ekonomi utama adalah perda- gangan. Dari sisi politik pun juga dianggap sebagai negara yang bukan demokrasi. Hasil penelitian Svensson (2005) dan Tella dan Ades (2007), dikritik Wijayanto (2009) bahwa pendekatan penegakkan hukum belum tentu cocok diterapkan di Indonesia, karena dengan tindakan represif di negara demokrasi bukan tidak mungkin akan mengundang protes, belum lagi ditambah dengan kondisi yang begitu kompleks dan beragam seperti Indonesia merupakan tantangan yang tidak mudah.

Pengembangan pendekatan yang lain seperti *bussinesman approach, market or economist*

[106] Heyneman, *International Journal of Educational Policy, Research and Practice,* Vol. 3, 2002, hlm. 75.

approach, cultural approach mutlak diperlukan. PAK di madrasah merupakan bentuk cultural approach dalam rangka pecegahan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, pembentukan lembaga yang idependen, pengawasan keu- angan oleh BPK, pengawasan pemerintahan oleh DPR, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan adanya LSM-LSM yang bergerak di bidang anti- korupsi masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Untuk itu perlu diimbangi dengan lang- kah alternatif pencegahan melalui madrasah sebagai gerakan budaya antikorupsi. PAK di madrasah merupakan pendekatan yang relatif efisien dalam hal pendanaan, namun sulit diharapkan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Dalam menanggapi model PAK di madrasah, khususnya pada jenjang SMA/MA belum ada kesepakatan. Ada dua model yang masih menjadi perdebatan yakni inklusif dan eksklusif. Jika hendak mengintegrasikan PAK melalui mata pelajaran tertentu hal penting yang harus dipersiapkan adalah mengembangkan RPP.

RPP PAK dalam PPKn jenjang SMA/MA yang dikembangkan guru kurang mampu mewujudkan tiga di- mensi kompetensi PPKn yakni civic knowledge, skill, dan dispositio/virtue, khususnya berkaitan dengan korupsi dan antikorupsi. Tujuan kognitif dan afektif masih dalam tingkatan rendah (C1 dan C2), yang didominasi informasi verbal dan penerimaan serta partisipasi saja. Merujuk pada teori hasil belajar Gagne[107] tujuan pembelajaran yang dikembangkan guru menekankan intelektual skill pada jenjang discrimination, concrete concept, dan rule using, tetapi belum sampai problem solving. Anderson[108] memberinya istilah "declarative knowledge" sehingga lebih banyak bernuansa mengetahui informasi "apa, kapan, dimana, dan siapa", belum mencapai pada tataran "mengapa, bilamana, dan seandainya".

Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan menjadi pilihan yang pertama dan utama dalam PAK melalui pembelajaran PPKn. Meskipun ada yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, namun masih kurang tepat secara konseptual dalam menuliskan langkah-langkah maupun dalam praktiknya. Tanya jawab, diskusi, dan penugasan lebih banyak mengerjakan LKS dibandingkan dengan melakukan aktivitas konstruktif untuk menggali pengetahuan atau menguji berbagai hipotesis.

Aktivitas guru dan siswa dalam PAK melalui pembelajaran PPKn terdapat persamaan di semua sekolah/madrasah khususnya pada kegiatan pembuka dan penutup. Kegiatan pembuka selalu diawali dengan absensi, kebersihan kelas, mengecek persiapan siswa untuk belajar, dan menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai.

Teknik asesmen yang digunakan dalam PAK melalui pembelajaran PPKn di semua madrasah menggunakan tes tulis dalam bentuk subjektif. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan

[107] Gagne, *The Conditioning of Learning, (*New York: Holt, Rinerhart and Winston, 1998), hlm. 54-60.
[108] Anderson, *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 17.

penggunaan penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Konstruksi siswa tentang korupsi dan antikorupsi dipengaruhi guru, media massa, dan internet. Guru mempunyai peran sebagai agen untuk memengaruhi pandangan siswa tentang korupsi dan antikorupsi. Dalam konteks PAK sebagai penguat karakter siswa, teladan kepala madrasah, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan merupakan salah satu aspek penting, sebagaimana pandangan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodho (di depan memberikan contoh). Lickona[109] memberikan istilah keteladanan sebagai *"value are cought"*, artinya nilai-nilai yang dilakukan anak pada dasarnya berasal dari (contoh) guru atau orang tuanya. Oleh karena itu, PAK di madrasah tidak cukup dengan membekali dengan seperangkat teori, tetapi lebih dari itu, bagaimana guru dapat menjadi idola perilaku bagi siswa. Dalam rangka membina karakter siswa guru harus menampilkan seorang yang berkarakter terlebih dahulu. Jangan berharap siswa dapat berkarakter jika guru tidak menampilkan perilaku yang berkarakter pula.

Pengaruh media massa dan internet turut memberikan andil dalam konstruksi siswa tentang korupsi. Untuk itu peran guru sebagai penengah dan memberikan arahan yang lebih bijaksana sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan sikap frustasi, antipati, pesimisme terhadap usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, dengan menempatkan media massa dan elektronik sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan karakter bangsa sudah tepat.

PAK melalui pembelajaran PPKn yang didukung oleh pengintegrasian nilai-nilainya ke dalam berbagai mata pelajaran belumlah cukup. Masih diperlukan habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya madrasah. Bentuk-bentuk budaya madrasah antara lain kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Keberadaan kantin kejujuran secara substansi memberikan kontribusi dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi. Temuan menarik dari praktik kantin kejujuran ini adalah: (1) kantin kejujuran yang berhasil dengan indikator adanya keuntungan dari tahun 2009-2011 berlokasi di kota kecil, sementara kantin yang kurang berhasil berada di kota besar. Keberhasilan kantin kejujuran disebabkan sistem pengelolaan, sosialisasi madrasah , dan dukungan orang tua. Khusus di MAN 1 Tuban XI MIPA 2, keberhasilan kantin kejujuran karena didukung oleh budaya anti menyontek yang sudah ada jauh sebelum ada kantin kejujuran. Budaya semacam ini secara rutin dihabituasikan secara turun-temurun dari kakak-kakak kelas kepada adik-adiknya. Di MAN 1 Tuban XI IPS 1 dengan menggunakan sistem terbuka penuh juga mendapatkan keuntungan selama periode Desember 2009 sampai dengan Juli 2011. Keberhasilan

[109] Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, (*New York: Bantam Books, 1991), hlm. 76.

dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: (1) sosialisasi yang terus me- nerus, jika ada kerugian pada hari tertentu maka pada saat doa bersama diumumkan bahwa di kantin keju- juran ada kehilangan barang dan mohon siswa mendoakan agar yang berbuat tidak jujur segera diberi keinsyafan, dan (2) keberadaan kantin kejujuran bagi siswa MAN 1 Tuban XI IPS 1 menjadi kebanggaan dimanifestasi- kan dengan menceritakan kepada teman-temannya yang berbeda madrasah . Sedangkan faktor eksternal antara lain: (1) adanya dukungan dari orang tua. Orang tua sangat mewanti-wanti (menasehati de- ngan ditekankan) jangan sekali-kali tidak membayar atau curang pada saat membeli di kantin kejujuran, dan (2) lokasi madrasah yang ada di ibukota kecamatan dan lingkungan yang agamis diprediksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kantin kejujuran di MAN 1 Tuban XI IPS 1.

Kerugian kantin kejujuran di MAN 1 Tuban XI MIPA 1 dan MAN 1 Tuban XI IPS 2 karena siswa tidak membayar sesuai dengan ketentuan dan kurangnya dalam sosialisasi kepada orang tua. Siswa yang tidak membayar bukan semata-mata tidak mempunyai uang tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh temannya sebagai bentuk solidaritas. Tidak jarang siswa justru saling menutupi ketika ada teman yang secara sengaja tidak membayar. Dalam penelitian yang dilakukan Erikson[110] bahwa anak usia 12-15 tahun pada masa adolescence: Identity vs Role Confusion (mencari identitas diri vs salah peran/kebingungan), di mana tidak membayar di kantin kejujuran merupakan bentuk mencarian identitas diri yang negatif sehingga dengan mudah dipengaruhi teman sejawat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sementara dalam pandangan Garbarino dan Brofenbrener bahwa anak pada usia 8-14 tahun merupakan tahap peeroriented morality (memenuhi harapan lingkungan).[111] Pada fase ini, lingkungan sebaya mulai memberikan pengaruh pada anak sehingga tindakannya akan menyesuaikan dengan teman sebaya agar dapat diterima dalam kelompok. Demikian juga dalam pandangan Kohlberg dan Lickona[112] bahwa anak-anak pada usia 12-15 tahun masuk dalam tingkatan kedua (Conventional) pada Stage Three, yakni Interpersonal accord and conformity (Social norms) (The good boy/good girl attitude). Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi "anak manis". Selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok. Kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya dihadapan kelompok. Siswa yang membayar dan tidak membayar di kantin kejujuran bisa jadi mendapatkan pengaruh dari teman sebaya (peer group). Dalam satu kelompok ada siswa yang tidak membayar dan mengajak teman-temannya, jika tidak mau akan "dicap" sebagai anak yang penakut, tidak mempunyai solidaritas terhadap kelompok. Pola-pola semacam ini terjadi pada masa-masa usia 12-15 tahun.

[110] Erikson, *Childhood and Society*, (New York: Norton, 1963), hlm. 17.
[111] Garbarino, *The Socialization of Moral Judgment and behavior in Cross-Cultural Perspective: in Lickona (ed). Moral Development Behavior, (*New York: Holt Rinehart and Winston, 1976), hlm. 7.
[112] Kohlberg, *Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Evelopmental Approach,* (Winston: Rinehart and Winston, 1976), hlm. 45.

Untuk itu, model kantin kejujuran akan lebih baik jika diawali dengan model induktif, yakni dengan membuat kantin-kantin di setiap kelas, dengan nama "pojok kejujujuran", artinya setiap kelas akan mempu- nyai satu kantin kejujuran yang menjadi tanggung jawab kelas yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghabituasikan tingkah laku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu. Jika kantin kejujuran di tingkat kelas sudah berjalan dengan baik baru ditingkatkan ke area yang lebih luas yakni tingkat madrasah. Kantin kejujuran di tingkat kelas bertujuan untuk mempersiapkan mental siswa menuju ke kantin kejujuran tingkat madrasah.

Budaya lain yang layak untuk dikembangkan sebagai pendukung PAK di madrasah adalah gerakan anti menyontek. Keberhasilan budaya menyontek di MAN 1 TUBAN XI MIPA 2 karena adanya konsistensi dalam menerapkan yang dilakukan guru. Meskipun menyontek bukanlah korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun sebenarnya dalam arti yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai "korupsi" yakni berbuat curang, tidak jujur, dan manipulatif. Menghabituasikan budaya antimenyontek secara terus menerus, berjenjang pada semua tingkatan pendidikan merupakan usaha dalam rangka menguatkan pendidikan karakter di madrasah mutlak diperlukan.

Penerapan kedisiplinan juga merupakan bentuk budaya yang mendukung PAK di madrasah. Kedisiplinan dalam arti yang luas bukan hanya ketepatan waktu masuk dan pulang jam madrasah, namun dalam dimensi yang lebih luas termasuk didalamnya ketepatan mengumpulkan tugas dalam berbagai mata pelajaran, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan, penggunaan peralatan labaratorium, dan lain- lain. Beberapa variasi penerapan kedisiplinan di sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai model. Di MAN 1 Tuban XI Bahasa, pelaksanaan kedisiplinan langsung di bawah kendali kepala madrasah. Diawali dengan membuat kebijakan tiga budaya yang akan dikembangkan yaitu: (1) disiplin tanpa diawasi, (2) bekerja tanpa diperintah, dan (3) tanggung jawab tanpa diminta. Wujud komitmen kepala madrasah untuk membudayakan kedisiplinan dengan cara terjun langsung memberikan contoh kepada siswa, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Misalnya, datang tepat waktu, memberitahu kepada wakil kepala madrasah jika ada keperluan pada saat jam madrasah, maupun pada waktu tertentu mengadakan supervisi di kelas tanpa mengurangi otoritas guru di kelas. Cara mendisiplinkan warga madrasah yang ada di MAN 1 Tuban XI IPS 2 bisa juga dijadikan model. Kepala Madrasah MAN 1 tuban XI IPS 2 menyadari bahwa kantin kejujuran kurang berhasil maka langkah yang diambil diawali dengan cara membuat komitmen untuk meningkatkan kejujuran melalui disiplin diri. Pengembangan 7 (tujuh) budaya, yaitu: (1) malu datang terlambat/pulang cepat, (2) malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas, (3) malu melanggar peraturan, (4) malu berbuat salah, (5) malu bekerja tidak berprestasi, (6) malu tugas ti- dak selesai tepat waktu, dan (7) malu tidak berperan dalam mewujudkan kebersihan kantor/madrasah . Di MAN 1 Tuban XI IPS 2, dikembangkan budaya mengakui jika melanggar tata tertib. Pada tahap awal yang

dikembang- kan tentang disiplin diri siswa. Jika ada siswa yang datang terlambat atau tidak memakai atribut dan kelengkapan seragam madrasah secara sadar menghadap ke guru piket dan mengakui atau menunjukkan jenis pelanggarannya. Jika secara jujur mengakui maka akan mendapatkan keringanan dengan syarat pelanggarannya kurang dari tiga kali. Namun jika tidak mengakui dan diketahui guru piket makan akan men- dapatkan hukuman lima poin pelanggaran di buku pribadi siswa. Usaha yang dilakukan MAN 1 Tuban XI IPS 2 berhasil dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk mentaati tata tertib madrasah, dengan suka rela mene- mui guru piket jika merasa melakukan pelanggaran. Kas kelas merupakan bentuk budaya yang dikembangkan di semua madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini.

Menempatkan kejujuran sebagai habituasi pokok dalam PAK di madrasah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai aktivitas kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler merupakan bentuk yang sangat tepat. Hal ini karena tujuan utama PAK di madrasah tidak dikonstruksi mampu melacak dan berani melaporkan kasus-kasus korupsi, tetapi lebih diarahkan pada pem- bentukan pola pikir, sikap, kesadaran, dan perilaku nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tang- gung jawab, terbuka, dapat dipercaya, dan lain-lain. terjadi kalangan generasi muda maka hal itu merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang dapat disampaikan adalah: (1) konstruksi guru PPKn tentang korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap yang membahayakan sehingga upaya penegakkan hukum belumlah cukup, tetapi harus diimbangi dengan PAK yang dimasukkan dalam kurikulum Sekolah /Madrasahsecara tertintegrasi atau inklusif sebagai bentuk gerakan sosiokultural pedagogik, (2) konstruksi guru tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa terhadap korupsi, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik, (3) perangkat pembelajaran PAK melalui mata pelajaran PPKnyang dikembangkan guru masih kurang mampu mewujudkan tiga dimensi kompetensi PPKn, (4) PAK melalui pembela- jaran PPKnmaupun berbagai mata pelajaran belumlah cukup, masih diperlukan habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya madrasah, melalui kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab, (5) PAK di Madrasahmelalui mata pelajaran PPKn sebagai inti, pendorong, penggerak, dan ujung tombak yang diarahkan pada dampak instruksional dan pengiring, sedangkan mata pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya Madrasah diarahkan kepada dampak pengiring saja.

SARAN

Berdasarkan atas hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, saran yang diusulkan sebagai berikut: (1) Pentingnya pemahaman guru PPKn secara komprehensif tentang konseptual-teoritis, praktis tentang korupsi dan antikkorupsi secara mendalam dengan memanfaatkan dan mengelaborasi berbagai sumber. Di samping sebagai bentuk penguatan profesionalisme profesi juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari sisi penge- tahuan, keteguhan, kemampuan hidup, kecakapan, kepedulian, watak, dan perilaku antikorupsi kepada siswa sebagai warganegara muda yang kelak akan menjadi tulang punggung kelanjutan perjalanan bangsa ini akan pentingya bahasa korupsi. (2) Nilai-nilai PAK seperti kejujuran, larangan menyontek, penga- daan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang dihabituasikan ke dalam berbagai aktivitas di Madrasah penting untuk disosialisasikan kepada orang tua agar mendapatkan dukungan, sehingga ada sinkronisasi dan saling memberikan penguatan antara afektif yang dihabituasikan di Madrasah dengan di rumah. (3) Kepada pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan perlu memiliki kemauan yang kuat untuk melaksana- kan dan menyebarluaskan PAK di madrasah . Pengintegrasian PAK ke dalam kurikulum Madrasah formal dengan menggunakan pendekatan inklusif yang dilakukan secara cermat mulai saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (4) Para kepala Madrasah untuk konsisten dan kontinyu mengembangkan budaya madrasah seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dan lain-lain ke dalam kehidupan madrasah.

DAFTAR RUJUKAN

Anderson, R. H. *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. Terjemahan oleh Yusufhadi Miarso, Slamet Sudarman, Yunarsih Kus- darmanto, Dewi Salma, Anung Haryono. 1987. Jakarta: Rajawali, 1985.

Budimansyah, D. Revitalisasi Pembelajaran Pendi- dikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Ke- warganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Acta Ci- vicus,* 2008, I(2): 179-198.

Bungin, B. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Center For Indonesian Civic Education Education. *Democratic Citizens in A Civic Society: Workshop Report*. Bandung: CICED, 1999.

Center For Indonesian Civic Education Education. *A Needs-Assesment for New Indonesian Civic Education: A National Survey 1999-2000*. Bandung: CICED, 2000.

Darmawan C., Kesuma, D., Permana, J. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi,* Bandung: Pustaka Aulia Press, 2008.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). *Handbook of Qualitative Research,* Terjemahan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, John Renaldi. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Denzin & Lincoln. *Handbook of Qualitative Research.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.* Surabaya: Dinas Pendidikan Pen- didikan Provinsi Jawa Timur, 2009.

Erikson, E.H. *Childhood and Society.* (2nd ed.). New York: Norton, 1963. (http://psychology .about.com/od/ psychosocialtheories/a/psychosocial_3.htmory, diakses, 19 Agustus 2009).

Gagne, R. M. *The Conditioning of Learning.* New York: Holt, Rinerhart and Winston, 1988.

Garbarino, J., Brofenbrener, U. 1976. *The Socialization of Moral Judgment and behavior in Cross-Cultural Perspective: in Lickona (ed). Moral Development Behavior.* New York: Holt Rinehart and Winston. Gurgur, T. and Shah, A. 2000. Localization and Corruption: Panacea or a Pandora's Box. *Presented at the IMF Conference on Fiscal Decentralization*, Washington, DC, November 21, 2000.

Hassan, F. *Pendidikan adalah Pembudayaan: da- lam Pendidikan Manusia Indonesia.* Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.

Heyneman, S. P. 2002. Defining the Influence of Education on Social Cohesion, *International Journal of Edu- cational Policy, Research and Practice* Vol. 3 (Winter), pp. 73-97.

Huberman, A. M., Miles, M. B. 2009. *Data Management and Analysis Method.* Dalam Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research,* Terjemahan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, John Renaldi. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Johnson, D. P. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives.* Terje- mahan oleh Robert M. Z. Lawang. Jakarta: Gramedia, 1981.

Kerr, D. *Citizenship Education: an International Comparison,* London: National Foundation for Educational Research-NFER, 1999.

Kohlberg, L., Lickona, T. *Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach. Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues.* Holt, NY: Rinehart and Winston, 1976.

Lickona, T. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility.* New York: Bantam Books, 1991.

Miles, M. B., & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (ed.2). Newbury Park, CA: Sage, 1993.

Patton, M. Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd* Ed). London: Sage Publication Ltd., 1990.

Patton, M. Q. *How to Qualitative Methods in Evaluation.* Terjemahan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, Jakarta 2010.

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indo- nesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*Quah, Jon S. T. 2002. Comparing Anti-Corruption Mea- sures in Asian Countries: Lessons to be learnt. *Asian Review of Public Administration.* XI(2).

Rahardjo, S. Sosiologi Pembangunan Peradilan Ber- sih dan Berwibawa. *Jurnal Ilmu Hukum,* Tahun 1999, II(1): 42.

Rusijono, Susanto, Supriyono, Murtedjo, Hariadi, E., Kusnanik, N. W., Kasrori, J. *Asesmen dan Penilaian*. Surabaya: Unesa Press, 2010.

Zuriah, N. *Model Pengembangan Pendidikan Ke- warganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).* Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Pascasarjana, 2010.